



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 61/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018

TENTANG

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
PERIODE TAHUN 2018 - 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018 – 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/PP.06-BA/05/KPU/II/2018 tanggal 8 Februari 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Nomor 48/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tanggal 9 Februari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE TAHUN 2018 - 2023.

KESATU : Menetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018 – 2023 dan Daftar Provinsi yang Melaksanakan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018 – 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jadwal Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan Tim Seleksi dalam melaksanakan proses Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018 – 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018
TENTANG
JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN
SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
PERIODE TAHUN 2018 - 2023

A. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE TAHUN 2018 – 2023

URAIAN KEGIATAN		DURASI (DALAM HARI)	JADWAL	
			MULAI	AKHIR
a.	Tim Seleksi menetapkan susunan keanggotaan	1	21 Februari 2018	21 Februari 2018
b.	Rapat koordinasi Tim Seleksi dengan sekretariat Tim Seleksi (jadwal, tempat, mitra kerjasama, materi, pembagian tugas dan lain-lain)	3	22 Februari 2018	26 Februari 2018
c.	Pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota	3	27 Februari 2018	01 Maret 2018
d.	Pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota	7	02 Maret 2018	12 Maret 2018
e.	Tanggapan masyarakat		02 Maret 2018	20 April 2018
f.	Penelitian administrasi calon anggota KPU Kabupaten/Kota	9	05 Maret 2018	15 Maret 2018
g.	Rapat penetapan calon anggota yang lulus Penelitian Administrasi	1	16 Maret 2018	16 Maret 2018

URAIAN KEGIATAN		DURASI (DALAM HARI)	JADWAL	
			MULAI	AKHIR
h.	Pengumuman hasil Penelitian Administrasi	3	19 Maret 2018	21 Maret 2018
i.	Tes tertulis dengan metode CAT	1	26 Maret 2018	26 Maret 2018
j.	Rapat penetapan hasil tes tertulis	1		
k.	Pengumuman hasil tes tertulis	1		
l.	Tes psikologi	3	27 Maret 2018	29 Maret 2018
m.	Rapat penetapan hasil tes psikologi	1	02 April 2018	02 April 2018
n.	Pengumuman hasil tes psikologi	3	03 April 2018	05 April 2018
o.	Tes kesehatan	5	06 April 2018	12 April 2018
p.	Tes wawancara	4	16 April 2018	19 April 2018
q.	Rapat penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara	1	20 April 2018	20 April 2018
r.	Pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara	3	21 April 2018	25 April 2018
s.	Rapat Penetapan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota	1	26 April 2018	26 April 2018
t.	Penyampaian nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota ke KPU RI	2	27 April 2018	28 April 2018

B. DAFTAR PROVINSI YANG MELAKSANAKAN SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE TAHUN 2018 – 2023

Tanggal Pelaksanaan Februari s.d. April 2018

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	Sumatera Barat	1. Kabupaten Agam
		2. Kabupaten Limapuluh Kota
		3. Kota Payakumbuh
		4. Kabupaten Tanah Datar
		5. Kota Bukit Tinggi
		6. Kota Solok
		7. Kabupaten Solok
		8. Kabupaten Solok Selatan
		9. Kabupaten Padang Pariaman
		10. Kabupaten Kepulauan Mentawai
		11. Kabupaten Dharmasraya
		12. Kabupaten Sijunjung
		13. Kabupaten Pasaman
		14. Kabupaten Pesisir Selatan
		15. Kabupaten Pasaman Barat
2.	Jambi	1. Kabupaten Batanghari
		2. Kabupaten Bungo
		3. Kabupaten Muaro Jambi
		4. Kabupaten Sarolangun
		5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
		6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
		7. Kabupaten Tebo
3.	Banten	1. Kabupaten Pandeglang
		2. Kabupaten Tangerang
		3. Kota Cilegon

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
		4. Kota Tangerang Selatan
4.	DKI Jakarta	1. Kabupaten Kepulauan Seribu
		2. Kota Administrasi Jakarta Barat
		3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
		4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
		5. Kota Administrasi Jakarta Timur
		6. Kota Administrasi Jakarta Utara
5.	Kalimantan Barat	1. Kabupaten Kapuas Hulu
		2. Kabupaten Sintang
		3. Kabupaten Melawi
		4. Kabupaten Sambas
		5. Kabupaten Bengkayang
		6. Kota Singkawang
		7. Kabupaten Kayong Utara
		8. Kabupaten Ketapang
		9. Kabupaten Sekadau
		10. Kabupaten Landak
6.	Kalimantan Tengah	1. Kabupaten Kapuas
		2. Kabupaten Kotawaringin Timur
		3. Kabupaten Kotawaringin Barat
		4. Kabupaten Barito Selatan
7.	Kalimantan Selatan	1. Kabupaten Balangan
		2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
		4. Kabupaten Hulu Sungai Utara
		5. Kabupaten Tapin
		6. Kabupaten Banjar
		7. Kabupaten Barito Kuala
		8. Kota Banjar Baru

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
		9. Kota Banjarmasin
		10. Kabupaten Kotabaru
		11. Kabupaten Tanahlaut
		12. Kabupaten Tanah Bumbu
8.	Gorontalo	1. Kabupaten Boalemo
		2. Kabupaten Bone Bolango
		3. Kabupaten Gorontalo
		4. Kabupaten Pohuwato
9.	Bengkulu	1. Kabupaten Bengkulu Tengah
		2. Kabupaten Bengkulu Utara
		3. Kabupaten Kepahiyang
		4. Kabupaten Seluma
		5. Kota Bengkulu
		6. Kabupaten Rejang Lebong
		7. Kabupaten Lebong
		8. Kabupaten Muko-Muko
10.	Kep. Bangka Belitung	1. Kabupaten Belitung Timur
		2. Kabupaten Bangka Tengah
		3. Kabupaten Bangka Barat
		4. Kabupaten Bangka Selatan
11.	Sulawesi Selatan	1. Kabupaten Gowa
		2. Kabupaten Bone
		3. Kabupaten Bulukumba
		4. Kabupaten Soppeng
		5. Kabupaten Barru
		6. Kabupaten Pangkajene Kepulauan
		7. Kabupaten Maros
		8. Kabupaten Toraja Utara
		9. Kabupaten Tanatoraja
		10. Kabupaten Luwu Timur

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
		11. Kabupaten Luwu Utara
12.	Sulawesi Utara	1. Kabupaten Bolmong Selatan
		2. Kabupaten Bolmong Timur
		3. Kabupaten Minahasa
		4. Kabupaten Minahasa Utara
		5. Kota Bitung
		6. Kota Manado
		7. Kota Tomohon
13.	Sulawesi Tenggara	1. Kabupaten Muna
		2. Kabupaten Buton Tengah
		3. Kabupaten Buton Utara
		4. Kabupaten Muna Barat
		5. Kabupaten Buton
		6. Kabupaten Wakatobi
		7. Kabupaten Buton Selatan
		8. Kota Bau-Bau
		9. Kabupaten Konawe
		10. Kabupaten Konawe Selatan
		11. Kabupaten Konawe Utara
		12. Kota Kendari
		13. Kabupaten Bombana
		14. Kabupaten Kolaka Utara
		15. Kabupaten Konawe Kepulauan
14.	Kepulauan Riau	1. Kabupaten Bintan
		2. Kabupaten Karimun
		3. Kabupaten Kepulauan Anambas
		4. Kabupaten Lingga
		5. Kabupaten Natuna
		6. Kota Batam
		7. Kota Tanjung Pinang

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
15.	Sulawesi Barat	1. Kabupaten Majene
		2. Kabupaten Mamuju
		3. Kabupaten Mamuju Utara

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono